

TOTAL DUKUNGAN APBN:
RP 335 TRILIUN(Terdiri dari Anggaran BGN: Rp265 triliun dan
cadangan anggaran: Rp70 triliun)

- Target penerima manfaat
82,9 juta orang
- Kebutuhan bahan
Rp 12.111 per hari
- Target SPPG (dapur MBG)
30 ribu unit
- Realisasi (Agustus 2025)
11.504 unit aktif
- Total pagu MBG 2025
Rp 171 triliun
- Dana standby tambahan
Rp 100 triliun
- Total dana tersedia
Rp 171 triliun

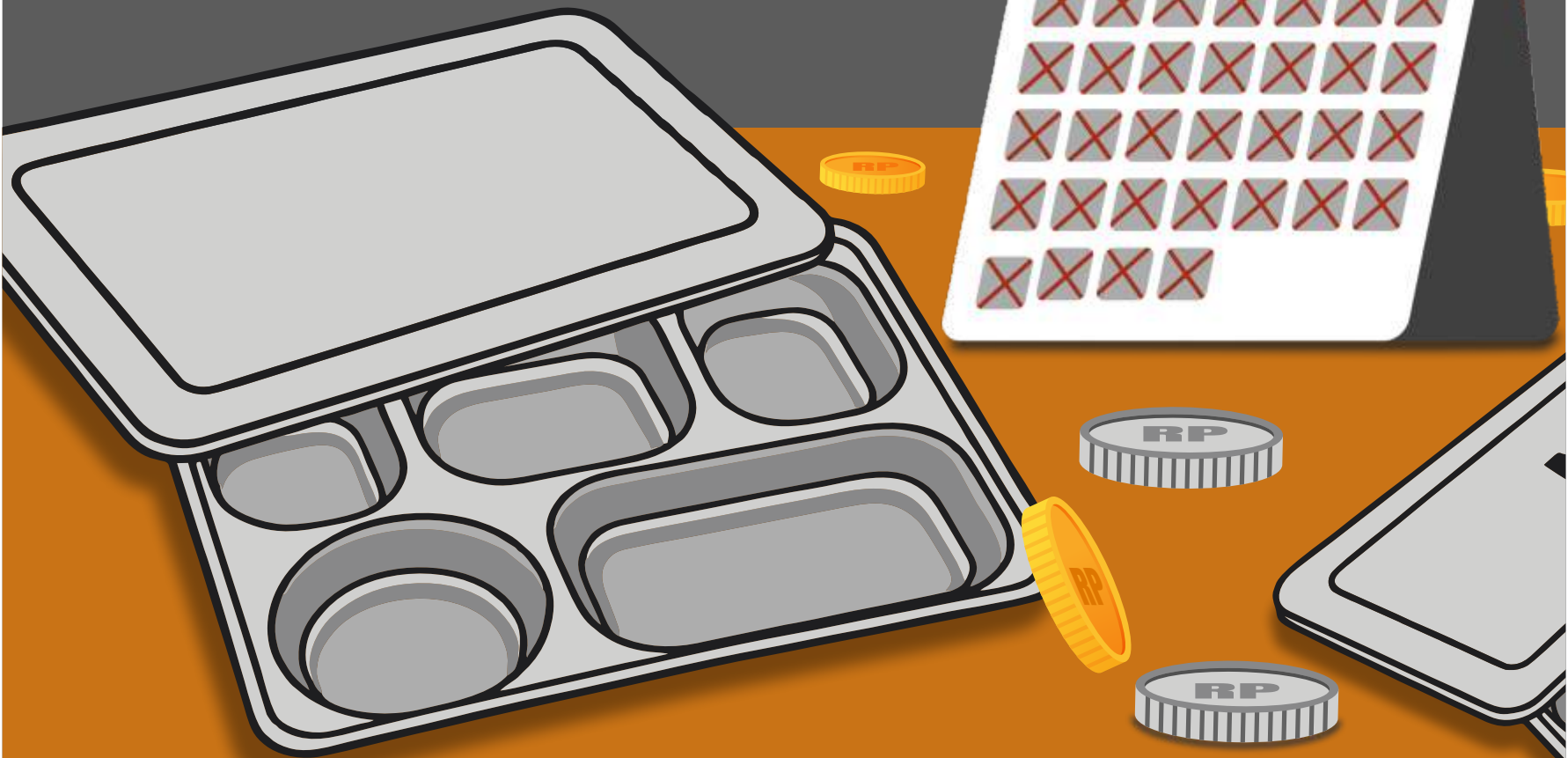
PERKARA BARU MBG: GAJI TERSENDAT

Akun resmi Instagram Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia, @badangizinasional.ri, diserbu ribuan komentar dari warganet pada awal pekan ini. Ribuan pekerja lapangan yang tergabung dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menumpahkan kekecewaan mereka di kolom komentar karena gaji yang dijanjikan tak kunjung cair. Padahal program ini hingga awal Oktober 2025, telah menyerap anggaran Rp 20,6 triliun dari pagu total Rp 71 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana sendiri mengakui adanya keterlambatan pembayaran. Ia menyebut permasalahan ini disebabkan oleh kendala administratif. Fakta ini menjadi ironi karena terindikasi terjadi kegagalan tata kelola yang sistemik. Program yang digadang-gadang sebagai proyek unggulan pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat dan anak sekolah ini kini malah menuai perkara dari para pelaksananya sendiri. Duh.

BACA HAL 11...

Perjalanan Penyerapan Anggaran MBG 2025

Januari Rp246 miliar	Maret Rp1,05 triliun	Mei Rp3,3 triliun	September Rp13,3 triliun
Februari Rp726 miliar	April Rp2,37 triliun	Juni Rp4,4 triliun	Oktober Rp20,6 triliun



PETINGGI TNI DISEBUT BEKINGI LIPPO SEROBOT TANAH JK

Kasus dugaan penyerobotan tanah milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, kembali menuai sorotan. Lahan seluas 16,4 hektare yang dikelola PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) disebut-sebut dimainkan oleh mafia tanah dan melibatkan Lippo Group. Belakangan, muncul tuduhan bahwa sejumlah perwira tinggi TNI ikut menjadi beking saat eksekusi di lokasi sengketa. Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sudah menerima surat balasan dari Pengadilan Negeri (PN) Makassar terkait sengketa tanah itu. Namun dia mengaku masih belum sepenuhnya memahami isi surat balasan tersebut.

Dugaan penyerobotan lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, yang turut menyeret nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) memasuki babak baru. Salah satu nama yang disorot ialah Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja, Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Achmad membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku hadir di lokasi hanya untuk memastikan tidak ada unsur TNI dari satuan kewilayahan (Kodim atau Koramil) yang terlibat dalam sengketa itu. "Saya datang untuk memastikan prajurit TNI tidak ikut campur. Posisi saya pun berada di luar pagar, bukan di area eksekusi," ujarnya, dikutip dari Herald, Selasa (11/11/2025).

Sebelumnya, mantan pejabat BUMN Muhammad Said Didu menuding ada "beking mafia tanah" dari kalangan TNI, Marinir, dan Polri yang ikut mengawal apa yang disebutnya sebagai "eksekusi abal-



Penampakan saat pembacaan eksekusi lahan di Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu, 5 November 2025. (Foto: Herald)

abal." Ia juga menyebut aparat netral yang tidak ikut dalam aksi itu kini justru dimutasi.

Melalui akun media sosialnya, @msaid_didu, Selasa (11/11/2025), Said menilai pencaplokan tanah seluas 16,4 hektar oleh PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), anak perusahaan dari Lippo Group, merupakan bagian dari praktik mafia tanah yang telah lama beroperasi.

Ia menyebut adanya keterlibatan sejumlah perwira bintang dua dari Mabes AD, Korps Marinir, hingga Mabes Polri, serta pihak GMTD yang diklaim memiliki kedekatan dengan pejabat di Kementerian ATR/BPN.

Menurut Said, foto-foto eksekusi lahan yang beredar menunjukkan indikasi keterlibatan langsung pihak-pihak tertentu. Ia menambahkan, aparat yang mencoba bersikap netral

justro dimutasi agar tidak menangani perkara tersebut.

Said menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengusut praktik mafia tanah, karena menurutnya jaringan oligarki telah menguasai mekanisme perampasan lahan rakyat.

Senada dengan itu, mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji lewat akun @susno2g menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum dan hakim yang terbukti terlibat harus ditindak tegas.

Dihubungi terpisah, Jusuf Kalla menyatakan lahan tersebut dibelinya secara sah dari ahli waris keturunan Raja Gowa sekitar tiga dekade lalu. Ia mengantongi dokumen resmi berupa empat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) serta akta pengalihan hak, dengan total luas mencapai 164.151 meter persegi. HGB tersebut, kata JK, telah diperpanjang hingga 24 September 2036.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengancam keras tindakan yang disebutnya sebagai permainan kotor pihak tertentu. "Itu kebohongan dan rekayasa. Jangan main-main di Makassar," tegas JK saat meninjau langsung lahan miliknya pada 5 November lalu.

Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Azis Tika, menambahkan bahwa pihaknya telah menguasai lahan itu sejak 1993 tanpa pernah terputus. Namun, GMTD baru mengajukan permohonan eksekusi pada 13 Agustus 2025, berdasarkan perkara lama yang bahkan tidak melibatkan PT Hadji Kalla sebagai pihak resmi.

Ketegangan di lokasi sempat meningkat pada Sabtu (18/10/2025) ketika kubu GMTD mencoba memasuki area yang dijaga oleh pihak JK, hingga terjadi bentrok fisik yang menyebabkan tiga orang terluka akibat panah. (ini, ger, ist/dya)

Menteri ATR/BPN Tak Tahu Tanah Negara Dijual di Proyek Whoosh



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku belum mengetahui adanya dugaan praktik jual beli tanah milik negara

dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Achmad membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku hadir di lokasi hanya untuk memastikan tidak ada unsur TNI dari satuan kewilayahan (Kodim atau Koramil) yang terlibat dalam sengketa itu. "Saya datang untuk memastikan prajurit TNI tidak ikut campur. Posisi saya pun berada di luar pagar, bukan di area eksekusi," ujarnya, dikutip dari Herald, Selasa (11/11/2025).

Sebelumnya, mantan pejabat

BUMN Muhammad Said Didu menuding ada "beking mafia tanah" dari kalangan TNI, Marinir, dan Polri yang ikut mengawal apa yang disebutnya sebagai "eksekusi abal-abal." Ia juga menyebut aparat netral yang tidak ikut dalam aksi itu kini justru dimutasi.

Melalui akun media sosialnya, @msaid_didu, Selasa (11/11/2025), Said menilai pencaplokan tanah seluas 16,4 hektar oleh PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), anak perusahaan dari Lippo Group, merupakan bagian dari praktik mafia tanah yang telah lama beroperasi.

Ia menyebut adanya keterlibatan sejumlah perwira bintang dua dari Mabes AD, Korps Marinir, hingga Mabes Polri, serta pihak GMTD yang

diklaim memiliki kedekatan dengan pejabat di Kementerian ATR/BPN.

Menurut Said, foto-foto eksekusi lahan yang beredar menunjukkan indikasi keterlibatan langsung pihak-pihak tertentu. Ia menambahkan, aparat yang mencoba bersikap netral justru dimutasi agar tidak menangani perkara tersebut.

Said menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengusut praktik mafia tanah, karena menurutnya jaringan oligarki telah menguasai mekanisme perampasan lahan rakyat.

Senada dengan itu, mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji lewat akun @susno2g menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum dan hakim yang terbukti terlibat harus ditindak tegas. (ini, ger, ist/dya)

BPIP DIUSULKAN JADI KEMENTERIAN

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), Panitia Kerja (Panja) di DPR RI memperdebatkan batas kewenangan lembaga tersebut. Sejumlah anggota dewan menilai, pembentukan BPIP harus memiliki landasan dan tujuan yang jelas agar tidak menjadi penafsir tunggal Pancasila maupun tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya. Dari perdebatan itu, muncul gagasan agar BPIP diubah menjadi kementerian apabila memang dianggap penting dan memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pembinaan ideologi di seluruh instansi negara. Hal ini sebagai langkah menjawab tantangan aktual terhadap Pancasila di era sekarang.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali menuai sorotan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengusulkan agar BPIP diubah menjadi kementerian supaya koordinasi dan pelaksanaan tugasnya lebih jelas.

Dalam rapat yang digelar Selasa (11/11/2025), anggota Panja semula membahas soal nomenklatur dan urgensi pembentukan lembaga baru melalui RUU BPIP. Menurut Benny, jika pemerintah menganggap Pancasila sebagai hal fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kedudukannya seharusnya diperkuat dengan status kementerian, bukan sekadar badan.

"Kalau memang Pancasila kita anggap penting, kenapa tidak dijadikan kementerian saja? Menteri negara urusan khusus tentang Pancasila akan lebih mantap, supaya koordinasinya jelas," ujar Benny dalam rapat di Kompleks Parlemen.

Politikus Demokrat itu juga menyoroti landasan filosofis dan yuridis dalam konsideran RUU yang dinilai belum menjawab tantangan aktual ideologi Pancasila di era modern. Ia mempertanyakan alasan mendasar dibentuknya BPIP sebagai lembaga khusus, serta relevansinya terhadap sistem hukum dan konstitusi yang sudah ada.

Benny menilai, isi RUU BPIP belum menjelaskan secara rinci makna ideologi Pancasila dan kedudukannya dalam tatanan hukum nasional. Ia juga mengingatkan agar lembaga tersebut tidak berperan sebagai "penafsir tunggal" Pancasila karena berpotensi mengulangi nasib lembaga seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang akhirnya dibubarkan.

"Jangan sampai BPIP menjadi lembaga yang menilai mana aturan yang sesuai atau bertentangan dengan Pancasila. Kalau begitu, nanti dia seperti Mahkamah Pancasila. Ini berbahaya," tegas Benny.

Dalam Pasal 10 draf RUU BPIP disebutkan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dilaksanakan oleh BPIP bersama lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, pemerintah daerah, badan usaha, serta warga negara. Menurut Benny, hal ini semakin menunjukkan



Rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA

bahwa fungsi BPIP beririsan dengan tugas kementerian, sehingga lebih tepat jika dinaikkan statusnya menjadi Kementerian Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Kalau di sini jelas bekerja bersama eksekutif, sekalian saja jadi kementerian di bawah Presiden. Kenapa harus badan?" ujarnya menegaskan.

Benny juga mengusulkan agar

pasal-pasal dalam RUU BPIP diperjelas, termasuk konsideran menimbang yang seharusnya memuat alasan sosiologis, yuridis, dan filosofis mengenai urgensi pembentukan lembaga tersebut. Ia menegaskan, tanpa kejelasan itu, RUU BPIP berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan multitafsir dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.

Punya Tugas Tambahan: Bina Naturalisasi Calon WNI

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menyepakati Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan memiliki tugas tambahan untuk pembinaan naturalisasi bagi calon Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP. Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan tugas itu termuat dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf p pada RUU tersebut.

Di poin itu, kata dia, BPIP melakukan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila bagi calon Warga Negara Indonesia. "Kami sepakat bahwa naturalisasi calon warga negara Indonesia harus diberikan pembinaan ideologi Pancasila, itu kita sepakati dulu," ujar Bob dalam rapat pembahasan RUU BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Namun, dia mengatakan, hal-hal

teknis mengenai poin tersebut akan dibahas di Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), termasuk soal BPIP yang tugas menyelenggarakan atau BPIP hanya menyiapkan materi pendidikannya saja.

"Nanti yang menyelenggarakan Kemenkum atau BPIP, itu nanti dirumuskan dalam Timus, Timsin, termasuk tata bahasa," tuturnya menerangkan.

Menurut dia, pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI itu merupakan tugas umum yang diberikan kepada BPIP, selain sebagai lembaga yang membantu Presiden.

Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Putra Nababan menyetujui perlu adanya pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI, termasuk bagi para atlet olahraga. Sebab, dia mengatakan bahwa saat ini cukup banyak proses naturalisasi yang dilakukan.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan untuk membatalkan rencana pemberian wewenang kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menilai indeks pembinaan ideologi Pancasila terhadap para penyelenggara negara. Ketentuan tersebut semula akan dimasukkan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

Setelah melalui pembahasan mendalam di Panitia Kerja (Panja) RUU BPIP, kewenangan itu diubah menjadi fungsi monitoring dan evaluasi. Langkah ini diambil agar BPIP tidak berpotensi disalahgunakan sebagai alat kekuasaan.

Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Iman Sukri, menjelaskan bahwa perubahan tersebut menanggapi kekhawatiran publik dan fraksi-fraksi di DPR. Draf sebelumnya menimbulkan kesan bahwa BPIP memiliki hak menilai lembaga negara lain, termasuk DPR dan MPR. (dct,tem,tin/dya)



PROFIL BPIP (BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA)

- **Latar Belakang & Pembentukan**
Berawal dari UKP-PIP (Perpres No. 54/2017), kemudian direvitalisasi menjadi BPIP lewat Perpres No. 7/2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 28 Februari 2018. UKP-PIP dibubarkan dan diganti dengan BPIP.
- **Dasar Hukum**
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018, masih berlaku hingga kini.
- **Tugas Utama (Pasal 3 Perpres 7/2018)**
Membantu Presiden merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, mengoordinasikan pembinaan nasional, menyusun standar pendidikan, dan memberi rekomendasi atas kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila.
- **Fungsi (Pasal 4 Perpres 7/2018)**
Merumuskan arah ideologi, menyusun peta jalan pembinaan, melakukan sosialisasi & kerja sama, mengkaji materi ajar, memberi advokasi kebijakan, serta memantau pelaksanaannya.
- **Tujuan Utama**
Menjadikan Pancasila pedoman hidup berbangsa dan memastikan seluruh kebijakan publik sejalan dengan nilai-nilainya.

Namun, dia mengatakan pihak yang menyelenggarakan pembinaan itu harus diperjelas terlebih dahulu dalam RUU tersebut.

"Tapi dalam konteks ini BPIP atau badan ini, mereka sifatnya hanya sebagai penyelenggara atau memberikan materi didiknya, materi ajarnya, atau sebagai apa? Ini yang perlu kita ketahui," kata Putra.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang BPIP untuk disusun di masa sidang ini. (ist,gus,ini/dya)

PULUHAN KORBAN LEDAKAN SMAN 72 JAKARTA TULI MENDADAK

Ledakan yang mengguncang SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11/2025), menimbulkan dampak serius bagi puluhan siswa dan guru. Dari total 96 korban luka, sebanyak lima siswa mengalami tuli mendadak akibat tekanan tinggi dari ledakan. Hal ini disebabkan tekanan udara berlebih (overpressure) saat bom meledak. Diketahui, dari total korban, 68 sudah dipulangkan, sementara 28 masih dirawat. Ada 13 orang di RSI Cempaka Putih, satu di RS Polri, dan 14 di RS Yarsi. Dari hasil rekapitulasi, 67 korban mengalami luka ringan, 26 luka sedang, dan tiga luka berat.

Direktur Medis RS Yarsi, dr. Muhammadi, mengungkapkan bahwa pihaknya masih merawat 11 pasien, termasuk satu yang sempat dirawat di ruang intensif. "Alhamdulillah, satu pasien yang sebelumnya menggunakan alat bantu napas sudah bisa dilepaskan sore ini. Kami berharap kondisi semua korban terus membaik. Lima di antaranya mengalami tuli mendadak tanpa kerusakan pada membran telinga," jelas Muhammadi, Selasa (11/11/2025).

Untuk memulihkan fungsi pendengaran, kelima siswa tersebut kini menjalani terapi hiperbarik, yakni terapi oksigen bertekanan tinggi. "Terapi ini diharapkan mempercepat proses penyembuhan dan memberikan efek perbaikan optimal pada sistem akustik telinga," ujarnya.

Muhammadi memastikan seluruh pasien mendapat penanganan medis intensif. "Alhamdulillah, hasil pemeriksaan audiometri menunjukkan tidak ada kerusakan berat. Dengan terapi hiperbarik, kami berharap fungsi organ siput bisa segera kembali normal dan menghantarkan suara dengan baik," tambahnya.

Selain itu, satu siswa mengalami kebocoran gendang telinga dan akan menjalani operasi kecil. "Sisanya kami observasi karena usianya masih muda



Barang bukti yang ditampilkan polisi terkait ledakan di SMAN 72 Jakarta saat sesi konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (11/11/2025).ist



dan berpotensi pulih secara alami," jelasnya.

Kepala Satuan Brimob Kombes Henik Maryanto menjelaskan bahwa gangguan pendengaran massal di SMAN 72 disebabkan tekanan udara berlebih (overpressure) saat bom meledak.

"Ledakan ini menimbulkan overpressure yang memengaruhi gendang telinga para korban," ujar Henik di Polda Metro Jaya.

Henik menambahkan, bom yang digunakan pelaku adalah bom aktif dengan sistem kendali jarak jauh, meski alat pemicunya belum ditemukan. Polisi juga menemukan serpihan paku baja dan paku payung di lokasi masjid yang menjadi sumber luka para korban. "Paku-paku itu berserakan di area masjid dan menjadi salah satu penyebab luka," katanya.

Penyelidikan menemukan ledakan

tidak hanya terjadi di masjid sekolah, tetapi juga di taman baca dan bank sampah dalam kompleks. "Di taman baca ditemukan casing kaleng minuman dengan sumbu bakar dan remot. Di bank sampah ada empat bom, dua meledak tak sempurna dan dua lainnya masih aktif," tambah Henik.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan, hingga Selasa (11/11), 28 korban masih menjalani perawatan di berbagai rumah sakit. "Dari total 96 korban, 68 sudah dipulangkan, sementara 28 masih dirawat — 13 di RSI Cempaka Putih, satu di RS Polri, dan 14 di RS Yarsi," jelas Asep. Dari hasil rekapitulasi, 67 korban mengalami luka ringan, 26 luka sedang, dan tiga luka berat.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menuturkan bahwa pelaku ledakan merupakan siswa

aktif SMAN 72 berusia 17 tahun yang bertindak sendiri. Ia diduga menjadi korban perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. "Kami masih mendalami motifnya, termasuk kemungkinan adanya perundungan. Proses hukum akan mengacu pada Undang-Undang Peradilan Anak," ujarnya.

Meski demikian, Iman menegaskan perbuatannya tetap tergolong melanggar hukum, dengan sangkaan

Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 355 KUHP, Pasal 187 KUHP, serta UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Perwira Humas Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana menegaskan bahwa aksi ini tidak terkait jaringan teroris mana pun. "Jadi, murni tindakan kriminal individu, bukan terorisme," tegasnya. (tin, ini, kum/dya)

6 TOKOH TEROR DUNIA DISEBUT MENGINSPIRASI PELAKU

- Eric Harris & Dylan Klebold**
Pelaku penembakan Columbine High School (1999), menewaskan 13 orang. Penganut neo-Nazi dan ekstrem kanan, simbol kekerasan remaja berbasis kebencian.
- Dylann Storm Roof**
Menembak 9 jemaat kulit hitam di gereja Charleston (2015). Penganut supremasi kulit putih, berideologi rasial.
- Alexandre Bissonnette**
Menyerang masjid di Quebec, Kanada (2017), menewaskan 6 orang. Anti-Islam dan white supremacist, pelaku Islamofobia paling mematikan di Kanada.
- Vladislav Roslyakov**
Melakukan penembakan di Politeknik Kerch, Krimea (2018), 20 tewas. Terinspirasi Columbine dan beraliran neo-Nazi.
- Brenton Tarrant**
Menyerang dua masjid di Christchurch, Selandia Baru (2019), 51 tewas. Penganut supremasi kulit putih, anti-imigran, menyiarkan aksinya langsung.
- Natalie Lynn "Samantha" Rupnow**
Pelaku penembakan sekolah di Wisconsin (2024), beraliran neo-Nazi. Kasusnya menarik perhatian karena pelaku perempuan muda.

Polisi Resmi Tetapkan Pelaku: Terinspirasi 6 Tokoh Teror

Dari hasil penyelidikan, tujuh bom rakitan ditemukan di lokasi sekolah, empat di antaranya sempat meledak. Polisi juga telah melakukan pengeledahan di rumah pelaku dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam perakitan bahan peledak tersebut.

Sejumlah korban masih dirawat di empat rumah sakit di wilayah Jakarta. Pihak kepolisian bersama lembaga terkait terus melakukan pemantauan kondisi para korban serta memberikan pendampingan trauma healing bagi mereka yang terdampak akibat peristiwa tersebut.

Di sisi lain, senjata mainan milik

pelaku, ditemukan beberapa nama asing yang ternyata merupakan tokoh-tokoh teror global. Pelaku, yang diketahui masih berstatus pelajar aktif di sekolah tersebut, kini tengah menjalani perawatan medis. Ia dikenal sebagai pribadi tertutup dan kesepian.

Menurut pernyataan PPID Densus 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana, nama-nama yang tertulis pada senjata tersebut adalah figur-figur pelaku aksi teror di berbagai negara dan diduga kuat menjadi sumber inspirasi bagi sang pelaku.

"Ini hal yang sangat memprihatinkan. Dari hasil pendalaman, ada sekitar enam figur

teroris yang menjadi inspirasi bagi pelaku," ujar Mayndra dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa (11/11/2025). (wid, ist, ant/dya)

Kepolisian mengumumkan perkembangan terbaru terkait kasus ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Siswa yang menjadi pelaku peledakan kini telah ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH).

"Berdasarkan hasil penyidikan sementara, anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH yang terlibat dalam peristiwa ledakan tersebut merupakan siswa aktif SMA. Ia bertindak secara mandiri dan tidak memiliki keterkaitan dengan jaringan teror tertentu," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers, Selasa (11/11/2025).

Densus 88 Antiteror Polri menyampaikan bahwa pelaku merupakan siswa SMAN 72 Jakarta yang diketahui sering mengakses situs gelap atau dark web. Ia belajar merakit bahan peledak secara otodidak dengan memanfaatkan informasi dari internet.

RESMI JADI TOL PROSIWANGI, MAS RIO TINJAU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PSN DI SITUBONDO

SITUBONDO - Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, meninjau pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kini resmi bernama Prosiwangi (Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi), setelah sempat dikenal dengan nama Probowangi.

Dalam kunjungannya, Bupati Rio menekankan pentingnya tol ini untuk meningkatkan konektivitas daerah serta mendukung mobilitas barang dan logistik yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat Situbondo.

Bupati Rio mengunjungi Desa Tepos di Kecamatan Banyuglugur, kawasan barat Kabupaten Situbondo. Di sana, ia memantau progres perbaikan sejumlah infrastruktur jalan kabupaten yang didanai oleh APBD. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperkuat jaringan jalan yang terhubung langsung dengan tol Prosiwangi.

Bupati Rio juga mengecek perkembangan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang melintasi Kabupaten Situbondo, serta mengungkapkan kebanggaannya atas penggantian nama tol dari Probowangi menjadi Prosiwangi.

"Akhirnya, tol ini resmi dinamakan Prosiwangi. Terima kasih kepada Bapak Nasim Khan, Anggota DPR RI, yang telah memperjuangkan pengubahan nama ini. Nama baru ini sangat penting bagi Situbondo," ujar Bupati Rio, Senin (10/11/2025).



Foto-foto (ist) ; Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat meninjau pembangunan PSN jalan tol Prosiwangi.

Perubahan nama tol ini diumumkan oleh Humas Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum melalui akun media sosial instagram @pupr.bpjt. "Uji laik fungsi dan operasi seksi 1 dan 2 Jalan Tol Prosiwangi," tulis Humas BPJT.

Jalan Tol Prosiwangi, yang membentang dari Probolinggo hingga Banyuwangi, terdiri dari beberapa seksi yang saat ini sudah memasuki tahap uji laik fungsi. Seksi 1 (Gending-Kraksaan) dan Seksi 2 (Kraksaan-Paiton) diperkirakan akan mulai difungsikan pada periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas saat musim liburan.

Proyek tol yang dikerjakan oleh PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ini kini sedang melanjutkan pembangunan seksi 3, yakni ruas Paiton-Besuki, yang telah mencapai progres konstruksi 85,23%. Kehadiran

ruas tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar kabupaten, serta mengurai kemacetan di jalur Pantura yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan.

"Setelah tol selesai, waktu tempuh dari Banyuwangi ke Probolinggo bisa dipangkas menjadi sekitar 45 menit, dari sebelumnya lebih dari dua jam. Ini akan berdampak positif terhadap efisiensi biaya logistik dan mempercepat distribusi barang ke berbagai wilayah," jelas Bupati Rio.

Dengan total nilai investasi proyek tol ini yang mencapai Rp 21 triliun, yang mencakup konsesi jalan tol di Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi, tol Prosiwangi akan menjadi bagian integral dari jaringan tol Trans Jawa.

Selain meningkatkan konektivitas, kehadiran tol juga membuka peluang besar dalam sektor investasi, terutama di bidang industri pengolahan hasil laut dan pertanian, pariwisata, serta

logistik.

Bupati Rio juga menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada infrastruktur tol semata.

"Penting bagi kita untuk membangun sinergi antara infrastruktur tol, akses lokal, serta program-program daerah yang mendukung. Ini bukan hanya tentang tol, tetapi bagaimana Situbondo bisa 'naik kelas' bersama-sama. Kita berharap masyarakat dan UMKM dapat memanfaatkan peluang yang ada," tutup Bupati Rio.

Proyek tol Prosiwangi diharapkan menjadi pendorong utama dalam pembangunan ekonomi daerah, memberikan dampak positif jangka panjang, serta memperkuat posisi Situbondo sebagai bagian dari peta tol nasional yang semakin terhubung dengan pusat-pusat ekonomi utama di Pulau Jawa. (mok,adv/dya)



KPK DIGUGAT, DITUDING HENTIKAN PENYIDIKAN KORUPSI HAJI YANG SERET YAQUT

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARRUKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Gugatan tersebut diajukan karena KPK dianggap menghentikan penyelidikan dugaan korupsi pengalihan kuota haji periode 2023-2024 yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Permohonan praperadilan itu

terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (7/11/2025) dengan nomor perkara 147/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung Senin (17/11/2025).

Dalam keterangannya, Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho menyebut pihaknya memohon agar hakim menyatakan penghentian penyidikan kasus tersebut tidak sah. "Atau apabila hakim tunggal memiliki pandangan lain, kami mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku," ujarnya, Selasa

(11/11/2025).

Gugatan ini menyasar pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, dan jajarannya sebagai pihak tergugat. ARRUKI dan LP3HI menilai lembaga antirasuah tidak menindaklanjuti penyidikan terhadap dugaan korupsi pengalihan kuota haji 2024 yang melibatkan pejabat di Kementerian Agama pada masa kepemimpinan Yaqut.

Menanggapi hal itu, KPK membantah keras tuduhan bahwa penyidikan dihentikan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa proses penyidikan masih

berjalan intensif. "Kami pastikan tidak ada penghentian penyidikan dimaksud," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

Menurut Budi, tim penyidik saat ini masih memeriksa berbagai pihak, termasuk ratusan biro travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di berbagai wilayah, serta menunggu hasil audit resmi kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Penyidik masih mendalami keterangan para pihak dan menghitung kerugian negaranya," tambahnya. (wid,ini,ist/dya)

Dapur MBG Kabupaten Malang Baru 40% Bersertifikat Higiene, Proses Panjang Uji Lab Disorot



Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Malang. (dok. Prokopim Kota Malang)

hingga lebih dari satu minggu. Hal menjadi salah satu kendala penerbitan sertifikat untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

"(SPPG yang mengantongi SLHS) belum ada separoh dari dapur SPPG yang sudah beroperasi. (Kendala utamanya) lebih banyak dari sisi waktu untuk pemeriksaan laboratorium. Bisa satu minggu lebih," ujar Plt Sekretaris Dinkes Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro,

dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (11/11/2025).

Dijelaskannya, berdasarkan hasil pemutakhiran data per 3 November 2025, terdapat 87 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Malang. Dari jumlah tersebut, 35 di antaranya telah memiliki SLHS.

"Yang belum beroperasi itu ada 23 SPPG. Kemudian dari jumlah SPPG yang sudah operasional, itu semuanya juga sudah mengikuti pelatihan keamanan pangan siap saji," jelasnya.

Selain itu, Gunawan juga menyebutkan sebanyak 2.475 relawan dari seluruh SPPG telah mengikuti pelatihan keamanan pangan siap saji. Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan salah satu tahapan penting untuk memastikan setiap penyelenggara MBG memahami standar kebersihan dan keamanan pangan sebelum memperoleh SLHS.

"Pelatihan atau kursus penjamah pangan masih akan terus bertambah. Untuk yang SLHS, itu bergantung pada masing-masing SPPG dalam melengkapi persyaratannya," katanya.

Gunawan menambahkan, Dinkes Kabupaten Malang berperan membantu memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS. Namun, target pencapaian secara keseluruhan tetap ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang menaungi program MBG secara

nasional.

"Kalau target, yang menentukan justru dari BGN sendiri. Tugas Dinkes membantu memfasilitasi percepatannya. Untuk pemenuhan persyaratan tergantung kesiapan masing-masing SPPG," terangnya.

Lebih lanjut, dalam upaya mendukung percepatan penerbitan SLHS, pihaknya juga telah melaksanakan sejumlah langkah. Di antaranya, mengundang kepala SPPG beserta yayasan atau mitra MBG untuk mengikuti sosialisasi percepatan penerbitan SLHS, serta menggelar koordinasi pelatihan keamanan pangan siap saji secara berkala.

Selain pelatihan, Dinkes juga melakukan sosialisasi teknologi tepat guna untuk memperbaiki kualitas air dan pengelolaan limbah di lingkungan SPPG. Upaya lain dilakukan melalui inspeksi kesehatan lingkungan yang melibatkan petugas puskesmas setempat.

"Yang jelas, dalam melakukan percepatan penerbitan SLHS, kami tetap mempertahankan standar. Semua SPPG diwajibkan mengurus SLHS," tegas Gunawan. (Santi/Dya)

Terdampak Isu Naiknya Pajak Kendaraan, Realisasi PAD Kota Malang Sempat Seret

MALANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mengakui realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor sempat melambat pada triwulan pertama dan kedua tahun 2025. Kondisi itu terjadi setelah beredar isu di masyarakat mengenai adanya kenaikan pajak kendaraan hingga 66 persen.

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menjelaskan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari dealer dan showroom kendaraan bermotor. Para pelaku usaha mengaku penjualan menurun karena calon pembeli menahan diri akibat isu kenaikan pajak tersebut.

"Awalnya kami dapat beberapa keluhan dari showroom dan dealer. Katanya ada tren penurunan pembelian motor baru karena ada isu kenaikan pajak 66 persen," ujar Handi, ditemui usai sosialisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada dealer kendaraan bermotor di Kota Malang, Selasa (11/11/2025).

Menurut Handi, isu yang beredar

di masyarakat adalah adanya tambahan opsen pajak sebesar 66 persen. Padahal, yang dimaksud bukanlah kenaikan pajak kendaraan. Melainkan sistem pembagian hasil pemungutan pajak antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota.

"Dikiranya pajak kendaraan bermotor naik 66 persen, padahal tidak. 66 persen itu adalah porsi yang masuk ke kas kabupaten atau kota, sementara 34 persen masuk ke kas provinsi," terangnya.

Dampak dari kesalahpahaman itu cukup terasa di lapangan. Pada triwulan pertama tahun 2025, disebutkan realisasi pendapatan dari sektor kendaraan bermotor mengalami perlambatan. Kondisi yang sama kembali terjadi pada triwulan ketiga, setelah isu serupa kembali beredar di masyarakat pada bulan Agustus.

"Karena ketika penjualan di dealer turun, otomatis berpengaruh ke capaian PAD," ungkap Handi.

Ditambahkannya, tren penurunan transaksi tidak hanya terjadi pada kendaraan baru, tetapi juga pada

kendaraan bekas. Banyak masyarakat yang menunda proses balik nama karena takut terkena tambahan pajak yang dikira naik hingga 66 persen.

Berdasarkan data per 9 November 2025, realisasi opsen PKB di Kota Malang tercatat sebesar Rp110,5 miliar dari target Rp126,2 miliar, sementara opsen BBNKB mencapai Rp45,2 miliar dari target Rp57,8 miliar. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp15,7 miliar untuk PKB dan Rp12,5 miliar untuk BBNKB.

"Kalau PKB-nya kemarin masih tercapai, BBNKB yang tidak tercapai. Mudah-mudahan di triwulan empat yang tersisa dua bulan ini bisa mengejar dan memenuhi target," kata Handi optimistis.

Handi kembali menegaskan, jumlah pajak kendaraan yang



Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, Selasa (11/11/2025). (Santi/Lentera)

dibayarkan masyarakat tahun ini sebenarnya sama dengan tahun sebelumnya. Tidak ada kenaikan nominal sedikit pun, meski kini terdapat item baru bertuliskan "opsen" pada lembar pembayaran pajak. "Lihat nominal totalnya. Tahun lalu dan tahun ini nilainya sama, tidak ada kenaikan satu rupiah pun," tegasnya. (Santi/Dya)

DURIAN DIUSULKAN JADI BUAH NASIONAL MALAYSIA

Klaim negara terhadap durian sering terjadi, terutama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand sebagai negara penghasil dan pencinta durian utama. Terbaru, Asosiasi Produsen Durian Malaysia (Durian Manufacturer Association/DMA) secara resmi meminta pemerintah menetapkan durian sebagai buah nasional Malaysia. Asosiasi tersebut juga mengusulkan agar tanggal 7 Juli dijadikan Hari Durian Nasional. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap buah yang dijuluki raja buah-buahan itu.

Presiden DMA, Eric Chan, menegaskan bahwa durian bukan sekadar komoditas pertanian, tetapi telah menjadi bagian penting dari identitas dan kebanggaan masyarakat Malaysia.

"Durian bukan sekadar buah biasa. Ia merupakan bagian dari identitas nasional kita. Setiap warga Malaysia, tanpa memandang latar belakang, memiliki kisah dan kenangan dengan durian—tradisi yang menyatukan kita semua," ujarnya seperti dikutip dari The Star dan The Straits Times, Selasa (11/11/2025).

Malaysia dikenal luas dengan varietas durian unggulan seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24, yang telah menempatkan negara tersebut sebagai penghasil durian premium di kancah internasional. Baru-baru ini, status Indikasi Geografis (IG) untuk Musang King, yang dikeluarkan oleh Badan Kekayaan Intelektual Malaysia, diperpanjang selama 10 tahun hingga Maret 2034.

Menurut Eric, perpanjangan status IG itu memperkuat posisi Musang King sebagai produk nasional yang sah dan dilindungi. "Pembaruan IG ini ibarat paspor resmi bagi Musang King. Ini membuktikan bahwa varietas ini benar-benar asli Malaysia, hasil kerja keras petani dan produsen lokal yang berhasil membangun merek global dari akar lokal," jelasnya.

Eric menambahkan, penetapan durian sebagai buah nasional dapat mendorong inovasi, riset, serta pengembangan sektor agrowisata yang berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Departemen Pertanian Malaysia, Nor Sam Alwi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan resmi dari DMA pada 8 September 2025 melalui Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ia menegaskan bahwa penetapan buah nasional membutuhkan kajian menyeluruh dan pertimbangan lintas lembaga.

"Faktor seperti dampak sosial-ekonomi, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, serta peran buah tersebut dalam industri pertanian nasional harus diperhitungkan," ujar



Seorang pedagang menata durian di sebuah kios pasar di Kuala Lumpur, Malaysia. (Dok.Rtr)

Nor kepada The Star.

Ia menambahkan, saat ini kementerian tengah meninjau usulan tersebut bersama departemen dan lembaga terkait agar keputusan diambil secara hati-hati dan menyeluruh.

Meski begitu, Nor menegaskan

hingga kini pemerintah Malaysia belum menetapkan durian secara resmi sebagai buah nasional maupun mengesahkan Hari Durian Nasional pada 7 Juli. Namun, ia membuka kemungkinan hal itu dilakukan di masa depan. "Jika usulan ini disetujui

Pernah Diklaim Singapura, Kini Banjiri Pasar Ilegal Indonesia

SETELAH sempat memicu kehebohan karena diklaim sebagai buah nasional oleh Singapura di 2024, durian kembali jadi sorotan. Kali ini, buah yang dikenal sebagai "raja buah" itu menimbulkan polemik baru karena masuknya durian ilegal asal Malaysia ke Indonesia melalui jalur Batam, Riau, dan Jakarta.

Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, mengungkapkan bahwa praktik penyelundupan durian asal Malaysia kian marak dan mengancam petani durian lokal. Ia menilai, fenomena ini tidak hanya merugikan pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga merusak sistem perdagangan nasional.

"Setiap harinya tercatat ada ratusan koli durian ilegal yang masuk ke pasar kita. Barang-barang yang masuk 100 persen ilegal," kata Labib beberapa waktu lalu. Menurutnya, sedikitnya 10 ton durian ilegal masuk ke wilayah Indonesia setiap hari tanpa izin resmi.

Praktik tersebut dilakukan oleh sejumlah pedagang nakal yang diduga bekerja sama dengan jaringan

penyelundupan lintas negara. Salah satu pelaku disebut rutin memasukkan 1-2 ton durian setiap hari dari Malaysia ke Jakarta melalui jalur Batam dan Riau.

"Kasus durian ilegal ini hanyalah salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang makin masif. Indonesia seperti menjadi surga bagi importir nakal, dari pakaian, elektronik, hingga produk hortikultura," tegas Labib.

Ahmad Labib menilai, lemahnya pengawasan distribusi dan perbatasan menjadi celah bagi penyelundupan. "Kita sudah menyerahkan laporan detail mengenai pelaku, kontak, dan jalur distribusi ke Kementerian Perdagangan. Ini harus ditindak tegas," ujarnya.

Ia menekankan perlunya pengawasan berbasis teknologi digital dan sinergi lintas instansi agar praktik ilegal bisa ditekan. "Langkah preventif dan penegakan hukum harus berjalan seimbang. Jika tidak, petani lokal akan terus jadi korban," katanya.

Selain merugikan petani, masuknya durian ilegal juga

nanti, pengumuman resmi akan dikeluarkan oleh kementerian setelah mendapat persetujuan pemerintah," katanya.

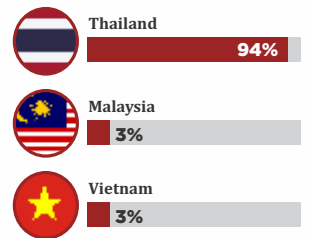
sekitar Rp 25 triliun, dari hasil ekspor durian ke China. Data tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia (KPKM) sebagaimana dikutip dari The Star.

Sejak tahun 2018 hingga Juni 2025, volume ekspor durian Malaysia ke China tercatat mencapai 115.359 ton, dengan total nilai ekspor sebesar 6,37 miliar ringgit. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan penerbitan sertifikat fitosanitasi yang menjadi syarat utama ekspor produk pertanian. (sta,ist,tin/dya)

○ Jumlah ekspor Durian Indonesia (2023)
591.89 Ton

○ Nilai ekspor Durian Indonesia (2023)
US\$ 1.11 Juta
(Rp17.16 Miliar)

Durian Ekspor Share (2022)



berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap tata kelola perdagangan nasional. Menurut Labib, fenomena ini mencerminkan pengkhianatan terhadap ekonomi rakyat.

"Kalau dibiarkan, pemain impor nakal akan terus merusak ekosistem perdagangan dan menyingkirkan pelaku lokal yang jujur. Ini bukan sekadar soal buah, tapi soal kedaulatan ekonomi," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Agustus 2024, warganet sempat dihebohkan oleh unggahan media sosial Asean Skyline yang menyebut durian sebagai buah nasional Singapura. Klaim itu menimbulkan perdebatan karena negeri tersebut tak memiliki lahan perkebunan yang cukup untuk menanam durian.

Bahkan, warganet Indonesia dan Malaysia ramai mempertanyakan di mana sebenarnya Singapura menanam durian. "Di balkon apartemen?" tulis salah satu komentar yang viral. Setelah menuai kontroversi, unggahan tersebut akhirnya dihapus, namun sempat memperuncing perdebatan soal asal-usul durian di kawasan ASEAN. (wid, ist/dya)

REKOMENDASI ATLET PROFESIONAL

3 MAKANAN INI LEBIH AMPUH DARI MINUMAN ISOTONIK

Pernah bertanya-tanya bagaimana para atlet bisa tetap bertenaga meski menjalani latihan intens atau pertandingan yang menguras stamina? Banyak orang mengandalkan minuman isotonik untuk mengganti cairan tubuh dengan cepat. Praktismemang, tetapi sebagian besar minuman tersebut mengandung kadar gula tinggi yang justru dapat menimbulkan efek samping bila dikonsumsi secara berlebihan. Berikut rekomendasi makanan sehat untuk tingkatkan stamina.

Kini banyak atlet profesional mulai beralih ke sumber energi yang lebih alami. Mereka memilih makanan pengganti minuman isotonik yang tidak hanya lebih sehat, tetapi juga terbukti mampu mendukung performa dan mempercepat pemulihan tubuh.

Penasaran apa saja makanan pilihan atlet yang punya manfaat luar biasa untuk hidrasi dan stamina? Simak tiga rekomendasi makanan pengganti minuman isotonik berikut, dikutip dari My Plant Based Plan.

Selada Air

Meski memiliki cita rasa sedikit pedas, selada air ternyata menyimpan segudang manfaat. Sayuran hijau ini mengandung kalsium yang lebih mudah diserap tubuh dibandingkan segelas susu. Tak hanya itu, kandungan vitamin K di dalamnya berperan penting dalam membantu penyerapan kalsium ke tulang, bukan ke pembuluh darah.

Dalam hal elektrolit, selada air juga tak kalah unggul. Di dalamnya terkandung magnesium, kalium, dan natrium dengan komposisi ideal untuk membantu pemulihan otot. Selain itu, kadar nitrat alami

dalam selada air membantu melancarkan peredaran darah, memberikan efek serupa dengan jus bit yang populer di kalangan atlet.

Uniknya, tanaman ini bisa tumbuh liar di sekitar sumber air bersih. Untuk menetralkan rasa pedasnya, kamu bisa mencampurkannya dengan buah segar seperti nanas. Beberapa universitas olahraga bahkan mulai menjadikan selada air sebagai booster legal untuk meningkatkan performa atlet. Hanya dengan tiga cangkir selada air, tubuh sudah mendapatkan asupan elektrolit yang menyaingi kebanyakan minuman pemulih stamina di pasaran.

Kerokot (Purslane)

Tanaman liar dengan batang kemerahan dan daun tebal yang sering kamu lihat di halaman rumah ternyata bukan gulma biasa. Itulah kerokot, tanaman yang diam-diam menjadi favorit para atlet karena manfaat nutrisinya yang luar biasa.

Daun kerokot memiliki kandungan magnesium tiga kali lebih banyak daripada bayam, menjadikannya sayuran hijau dengan kadar magnesium tertinggi di dunia. Tak mengherankan bila para atlet Olimpiade di zaman Yunani kuno sudah memanfaatkannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara alami.

Keunggulan lain dari kerokot adalah daunnya yang menyimpan air dan elektrolit secara alami, serta kandungan omega-3 tinggi yang mampu

meredakan peradangan akibat aktivitas fisik berat, bahkan lebih efektif dibandingkan minyak ikan. Beberapa petinju asal Meksiko menjadikan smoothie kerokot sebagai rahasia energi sebelum bertanding.

Jika ingin mencoba, pilih daun muda karena rasanya lebih segar dan sedikit asam. Banyak pelari ultra-marathon juga mengaku lebih jarang mengalami kram otot setelah mengonsumsi kerokot dibanding menggunakan gel elektrolit. Selain itu, pigmen betalain yang terdapat di dalamnya berfungsi sebagai pelindung otot dari kerusakan oksidatif.

Pasta Asam Jawa

Selain menjadi bumbu dapur, pasta asam jawa ternyata menyimpan manfaat besar sebagai booster elektrolit alami khas tropis. Dalam satu sendok makan pasta ini, kandungan kalium-nya bahkan melampaui sepuluh buah pisang.

Tak heran jika para petinju tradisional Thailand memanfaatkan pasta asam jawa sebagai sumber energi alami di sela-sela pertandingan. Rasanya yang asam dan segar tak hanya membangkitkan semangat, tetapi juga memberikan elektrolit penting yang sulit ditiru oleh minuman isotonik buatan.

Yang membuatnya semakin istimewa adalah kandungan asam tartarat, yang membantu tubuh menyerap mineral secara optimal — keunggulan yang jarang ditemukan pada produk olahraga modern. Teksturnya yang kental juga membantu menjaga kelembapan mulut dan mencegah tenggorokan kering selama aktivitas fisik panjang. Di wilayah Karibia, pemain kriket kerap melarutkan pasta asam jawa ke dalam air sebagai minuman wajib saat bertanding di bawah terik matahari. Bila ingin mencoba, pilih versi tanpa biji dan tanpa gula tambahan. Cukup larutkan satu sendok teh dalam air hangat,

dan kamu sudah mendapatkan minuman pemulih stamina alami yang lebih unggul daripada kebanyakan produk komersial. Bonusnya, kandungan vitamin B dalam pasta ini membantu tubuh mengubah gula alami menjadi energi siap pakai. (wid,pla,ist/dya)

Manfaat Lain Selada Air

Menjaga kesehatan jantung

Kandungan folat, vitamin A, dan vitamin C pada selada membantu mengontrol kolesterol dan melindungi jantung dari penyakit seperti stroke atau arteri koroner.

Merawat kesehatan kulit

Air dalam selada membantu menjaga kelembapan kulit, sementara vitamin A dan C mencegah penuaan dini serta meratakan warna kulit.

Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Kandungan antioksidan, vitamin, dan mineral pada selada membantu memperkuat sistem imun dan melawan infeksi.

Membantu kesehatan mata

Vitamin A dari selada penting untuk menjaga penglihatan tetap sehat dan mencegah gangguan seperti katarak atau glaukoma.

Menjaga kesehatan tulang

Kandungan mineral, vitamin K, dan asam folat membantu penyerapan kalsium serta mencegah osteoporosis.



Pasta Jawa



Kerokot (Purslane)



Selada Air

MENDADAK KIM KARDASHIAN DESAK NASA BUKA DATA KOMET 3I/ATLAS, ISU ALIEN MENYERUAK



Sosok Kim Kardashian kembali menjadi sorotan publik, bukan karena drama keluarga atau bisnis kecantikannya, melainkan karena keterlibatannya dalam dunia sains. Bintang reality show dan pengusaha tersebut kini mendorong NASA untuk membuka data lengkap tentang komet antarbintang misterius 3I/ATLAS, yang tengah menimbulkan perdebatan di kalangan ilmuwan.

Keterlibatan Kim bermula dari interaksinya di media sosial dengan Pelaksana Tugas Administrator NASA, Sean Duffy. Ia menanyakan perihal komet yang disebut memiliki karakteristik tak lazim.

Duffy dengan cepat menanggapi, "Tidak ada alien. Tidak ada ancaman bagi kehidupan di Bumi." Namun, respons cepat itu justru memicu tanda tanya di kalangan ilmuwan yang belum mendapat akses ke data penuh tentang komet tersebut.

Menariknya, Avi Loeb, astrofisikawan dari Harvard University yang dikenal dengan pandangan beraninya soal kehidupan luar angkasa, kemudian ikut menyoroti hal ini. Loeb bahkan mengundang Kim untuk bergabung dalam diskusi tim penelitiannya. Menurutnya, kehadiran figur publik seperti Kim dapat membantu menarik perhatian masyarakat terhadap penelitian ilmiah.

Loeb menuturkan, "Apakah ini bentuk teknologi? Apakah lintasannya dirancang oleh kecerdasan tertentu?" — sebuah pernyataan yang memunculkan spekulasi bahwa 3I/ATLAS mungkin bukan sekadar fenomena alam biasa. Komet 3I/ATLAS merupakan objek antarbintang ketiga yang pernah melintasi tata surya setelah 1I/Oumuamua (2017) dan 2I/Borisov (2019). Komet ini memiliki lintasan hampir sejajar sempurna dengan bidang orbit planet, dengan

peluang hanya 0,2 persen untuk terjadi secara alami. Lebih mengejutkan lagi, komet tersebut memancarkan nikkel dalam jumlah besar dengan sedikit kandungan besi, ciri yang umumnya dikaitkan dengan proses industri buatan.

Namun, penelitian terhadap komet 3I/ATLAS mengalami hambatan akibat penutupan sebagian aktivitas pemerintahan Amerika Serikat. Padahal, NASA dilaporkan telah merekam gambar beresolusi tinggi melalui kamera HiRISE, tetapi data tersebut belum dapat diakses oleh para ilmuwan. Loeb mengkritik kondisi ini dengan keras "Penyebaran informasi ilmiah tidak seharusnya disandera oleh politik." Ia menambahkan, "Jika selebritas seperti Kim Kardashian bisa mendapat jawaban cepat, ilmuwan dan Kongres juga seharusnya mendapat hal yang sama."

Elon Musk Juga Komentar

Ketertarikan terhadap komet misterius ini semakin meningkat ketika diketahui bahwa 3I/ATLAS menunjukkan manuver tak biasa di

dekat Jupiter, Venus, dan Mars. Bahkan, Elon Musk turut berkomentar dalam wawancaranya di The Joe Rogan Experience, dengan mengatakan, "Komet itu bisa saja buatan alien."

Menurut penjelasan resmi NASA, 3I/ATLAS adalah komet ketiga yang dikonfirmasi berasal dari luar tata surya. Huruf "I" dalam namanya menandakan bahwa ia merupakan objek interstellar atau antarbintang, berasal dari sistem bintang lain. NASA menjelaskan, "Komet 3I/ATLAS adalah objek ketiga yang diketahui berasal dari luar sistem tata surya kita yang ditemukan melintasi wilayah langit kita. Para astronom telah mengklasifikasikan objek ini sebagai objek antarbintang karena bentuk lintasan orbitnya yang hiperbolik."

Komet ini memiliki kecepatan luar biasa, mencapai sekitar 61 kilometer per detik (atau 221.000 km/jam) saat melintasi bagian dalam tata surya. "Saat ditemukan, komet antarbintang tersebut bergerak dengan kecepatan sekitar 137.000 mil per jam, dan kecepatannya akan meningkat seiring mendekati Matahari," tulis NASA dalam keterangannya.

Komet 3I/ATLAS pertama kali diamati pada 1 Juli 2025 oleh teleskop survei ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) yang didanai NASA di Rio Hurtado, Chile. Komet tersebut datang dari arah rasi bintang Sagittarius dan kini berada sekitar 670 juta kilometer dari Bumi.

Sejak penemuan itu, data tambahan diperoleh dari arsip teleskop ATLAS lain di berbagai belahan dunia serta Fasilitas Transien Zwicky di Observatorium Palomar, California. Pengamatan "pra-penemuan" bahkan menunjukkan bahwa objek ini telah terlihat sejak pertengahan Juni 2025. Meski memicu spekulasi luas, NASA menegaskan bahwa komet ini tidak berbahaya bagi Bumi. (nsa,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Efek Lisa BLACKPINK: Terakota Jadi Warna Bibir Paling Panas 2025

Lipstik cokelat kembali merebut sorotan dunia kecantikan, dan tahun ini, popularitasnya semakin tak terbendung berkat gelombang tren yang dipimpin Lisa BLACKPINK. Terakota yaitu kombinasi cokelat muda dengan sentuhan merah atau oranye lembut ini kembali menjadi primadona.

Setelah sebelumnya nuansa milk tea sempat mendominasi media sosial, kini warna yang melanjutkan estafet adalah cokelat terakota. Kombinasi cokelat muda dengan sentuhan merah atau oranye lembut ini kembali menjadi primadona, mengingatkan banyak orang pada tren kecantikan era 90-an, namun dengan sentuhan modern yang lebih halus dan adaptif.

Warna terakota kini tampil sebagai versi baru dari tren bibir hangat yang lebih membumi dan universal. Berkat perpaduan oranye terbakar, toffee, serta semburat mawar, warna ini menghadirkan kesan lembut sekaligus elegan.

Tak mengherankan jika banyak pecinta makeup menyebut warna ini sebagai pilihan “aman namun memikat”, karena cocok pada berbagai warna kulit dan bisa dipakai baik untuk tampilan sehari-hari maupun acara formal. Seniman Internasional Global Lancôme, Sheika Daley,

menggambarkan pesona warna ini dengan sangat tepat. Ia menegaskan bahwa “Cokelat terakota adalah salah satu warna abadi yang tak pernah benar-benar hilang. Warna ini selalu berganti setiap beberapa tahun. Warna ini memiliki rona dasar hangat seperti sinar matahari yang cocok untuk semua warna kulit, terutama warna kulit yang lebih gelap. Warna ini langsung menambahkan kedalaman dan kecanggihan tanpa terasa berat. Warna ini memberikan kehangatan yang kita semua idamkan di musim gugur, warna nyaman untuk bibir.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa terakota bukan sekadar tren sesaat, tetapi warna klasik yang selalu menemukan jalan kembali ke barisan terdepan dunia makeup.

Ketika mendengar “terakota”, pikiran banyak orang langsung mengarah pada warna bata yang kaya. Dalam dunia kecantikan, terakota hadir sebagai warna yang lebih lembut dan halus: cokelat muda dengan

sedikit sentuhan merah atau oranye. Karena itu, shade ini sangat fleksibel dan mudah diadaptasi untuk berbagai undertone kulit. Inti dari penggunaan lipstik terakota adalah menemukan

komposisi yang paling sesuai—lebih merah untuk tampilan bold nan hangat, atau lebih oranye untuk gaya segar dan youthful.

Daya tarik lipstik terakota semakin kuat berkat fenomena viral di TikTok dan berbagai red carpet. Banyak warganet menyebut kombinasi merah mawar dan toffee sebagai formula yang mampu memberikan efek “hangat natural” yang sulit ditandingi warna lain, bahkan melampaui popularitas lipstik merah klasik yang selama puluhan tahun dianggap tak tergoyahkan.

Tren di Kalangan Selebriti

Selain Lisa BLACKPINK yang memicu lonjakan tren lewat penampilan-penampilannya di Paris Fashion Week, sejumlah selebritas global juga ikut memperkuat arus kebangkitan warna ini. Zendaya menjadi salah satu ikon awal yang tampil memukau dengan terakota di Paris Fashion Week untuk show Valentino Spring/Summer 2023. Penampilannya menandai titik balik kebangkitan tren cokelat hangat di industri kecantikan.

Leni Olumi Klum kemudian mempertegas dominasi tren ini lewat penampilan serba senada di runway Michael Kors Spring/Summer 2025 pada New York Fashion Week. Tak ketinggalan, Selena Gomez memilih nuansa earthy terakota untuk penampilan kasual saat berkencan dengan Benny Blanco—membuktikan bahwa warna ini bisa tampil romantis tanpa berlebihan.

Momo TWICE menyuguhkan versi yang lebih berkilau dan cerah saat menghadiri Milan Fashion Week, memberikan sentuhan glamor namun tetap lembut, terutama ketika dipadukan dengan blush dan warna rambut musim gugur.

Salah satu alasan terakota begitu populer adalah karakternya yang membumi dan serbaguna. Warna ini memberikan kedalaman tanpa terlihat berat, sekaligus mudah dipadukan dengan gaya makeup apa pun, dari soft glam, clean girl look, hingga tampilan editorial untuk runway.

Selain itu, kebangkitan tren warna cokelat turut memperkuat posisinya. Jika sebelumnya cokelat moka gelap mendominasi, tahun 2025 membawa perubahan besar ketika Pantone menetapkan moka mousse sebagai warna tahun ini. Para makeup artist

global pun mulai menggeser preferensi dari cokelat pekat menuju warna yang lebih ringan dan hangat, memberi ruang sempurna bagi terakota untuk bercahaya.

Seiring cuaca yang semakin dingin, warna terakota juga memberi kehangatan visual yang terasa cocok dengan suasana musim gugur hingga awal musim dingin. Itulah sebabnya banyak yang menyebut warna ini sebagai “comfort color” untuk bibir, nyaman, lembut, dan elegan tanpa usaha berlebihan. (fim,ist/dya)

7 Warna Lipstik Cokelat yang Jadi Tren 2025

Coklat Moka

Perpaduan coklat tua + nuansa kopi lembut. Cocok untuk kulit terang hingga gelap. Ideal untuk siang & malam; tampil anggun dengan riasan natural.

Cinnamon Spice

Nuansa coklat kemerahan yang hangat dan dramatis. Cocok untuk kulit sedang-gelap. Pas untuk acara penting atau formal.

Cokelat Nude

Memberi kesan lembut, alami, dan elegan. Cocok untuk acara santai maupun kerja. Bisa mengikuti undertone dingin, hangat, atau netral.

Cokelat Ceri

Sentuhan plum/beri yang glamor. Cocok untuk acara malam atau editorial. Memberi kesan kalem namun tetap mewah.

Cokelat Taupe

Nuansa coklat keabu-abuan modern, disukai Gen Z. Memberikan gaya edgy & minimalis. Hasil matte semakin memperkuat kesan stylish.

Perkara Baru MBG ...dari hal 1

Akun Instagram BGN, @badangizinasional.ri, diserbu oleh warganet yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji petugas MBG. Keluhan paling banyak datang dari para pekerja di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka menuding BGN tidak menepati isi Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang menyebut gaji dibayarkan setiap tanggal 6 setiap bulan.

"Di SPK tertulis tiap tanggal 6 cair, tapi meleset jauh. Bahkan yang SPK-nya dari Juli, untuk termin Juli dan Agustus belum dibayar. September-Oktober gajian, tapi nominalnya tidak sesuai, harusnya Rp6,5 juta per bulan," tulis akun @muh.raf.33 di Instagram, dilihat Selasa (11/11/2025).

Keluhan itu muncul di tengah unggahan BGN yang menampilkan capaian program. Dalam unggahan tersebut, BGN menyebut lebih dari 41,2 juta penerima manfaat telah menikmati program MBG. Angka ini diklaim sebagai separuh dari target nasional sebanyak 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Namun, capaian itu justru memicu amarah. Warganet menuduh pejabat BGN sibuk menggelar kegiatan seremonial di hotel berbintang sementara ribuan pekerja dapur belum menerima hak mereka.

"Menjelang akhir tahun, BGN malah bakar-bakar anggaran bikin sosialisasi di hotel. Di absensi tertulis ada uang saku dan transport, tapi nyatanya cuma nominal di atas kertas. Kerja dari pagi sampai pagi di dapur, Sabtu-Minggu masih ikut acara, tapi gaji belum cair!" tulis salah satu akun dengan nada kesal.

Keluhan serupa datang dari akun @mhmdnanda_02 yang menulis,

"Gaji pak, gaji... Anak istri saya mau makan juga biar bergizi."

Sementara akun @anjaz_pulamba24 juga menuntut agar gaji segera dibayarkan karena kesulitan menafkahi keluarga. "Bayar gaji SPPG kami, perlu menafkahi keluarga," tulisnya.

Hingga berita ini diturunkan, komentar-komentar protes di akun BGN telah mencapai ratusan unggahan, termasuk pada foto kegiatan MBG di SDN Kalibaru 07 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, yang diunggah 9 November lalu.

Menurut Transparency International Indonesia (TII), keterlambatan pembayaran gaji para kepala dapur MBG bukan masalah individu atau administratif semata, melainkan indikasi kegagalan tata kelola yang sistemik.

Peneliti TII, Agus Sarwono, menilai kekacauan pembayaran ini menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran dan koordinasi antarinstansi.

"Keterlambatan ini menandakan adanya kegagalan tata kelola MBG yang sistemik. Sebagai contoh, capaian Badan Gizi Nasional selama ini lebih banyak berfokus pada jumlah penerima manfaat dan jumlah dapur yang berdiri, bukan pada kesiapan sistem pendukung seperti pembayaran gaji," kata Agus, Selasa (11/11/2025).

Ia menambahkan, fenomena pekerja menagih gaji lewat media sosial adalah bentuk frustrasi terhadap sistem yang tidak melindungi hak-hak mereka.

"Padahal, semestinya orang yang bekerja kepada negara lebih terjamin haknya dibandingkan pekerja swasta," tegas Agus.

Agus juga menyoroti posisi anggaran MBG yang disebut-sebut berada di dalam fungsi pendidikan, sehingga pengelolaan administratif menjadi membingungkan. "Ditambah lagi, program ini tidak memiliki regulasi yang memadai," ujarnya.

TII dan sejumlah pengamat kebijakan publik menilai peristiwa ini sebagai alarm bagi pemerintah untuk membenahi sistem pembayaran, perencanaan anggaran, serta regulasi dasar program MBG.

"Transparansi harus menjadi kunci. Jika gaji ribuan pekerja yang menyiapkan makanan bergizi saja macet, bagaimana publik bisa percaya bahwa pengelolaan anggaran triliunan rupiah untuk MBG benar-benar tepat sasaran," kata Agus Sarwono.

BGN: Masalah Administratif

Menanggapi gelombang protes tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui adanya keterlambatan pembayaran. Ia menyebut permasalahan ini disebabkan oleh kendala administratif.

"Masalah administrasi saja," ujar Dadan melalui pesan singkat. Ia menambahkan bahwa seluruh gaji pekerja akan dibayarkan paling lambat akhir pekan ini. "Minggu ini selesai semua," katanya singkat.

Penjelasan lebih rinci datang dari Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, yang menyebut bahwa keterlambatan gaji tidak terkait kekurangan anggaran, melainkan murni masalah teknis administratif.

"Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar, dan beberapa di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi. Kami memastikan proses ini segera tuntas," ujar Nanik dalam konferensi

pers di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Menurut Nanik, terdapat sekitar 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, ditambah ribuan tenaga ahli gizi dan akuntan yang bekerja mendukung program MBG. Volume data yang besar menyebabkan proses verifikasi dan sinkronisasi data kepegawaian menjadi lambat, terutama bagi SPPG Batch III yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Untuk Batch I dan II yang sudah berstatus PPPK, pembayaran gaji tidak mengalami hambatan. Kami pastikan semua petugas akan menerima haknya secara penuh," tegasnya.

Nanik menambahkan, pembayaran yang tertunda dalam beberapa minggu terakhir akan dirapel dan diprioritaskan penyelesaiannya minggu ini.

"Kami sudah mengarahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar bekerja lebih proaktif dan memastikan tidak ada keterlambatan terulang. Seluruh gaji petugas sedang diproses dan akan dirapel sesuai haknya," jelasnya.

Ia juga menuturkan bahwa BGN telah menunjuk kedeputan khusus sebagai leading sector untuk urusan penggajian dan menginstruksikan seluruh unit teknis, termasuk Kepala Biro Umum dan Keuangan serta PPSPM, untuk mempercepat penyelesaian administrasi.

"Kami ingin memastikan seluruh petugas mendapatkan haknya tepat waktu, tanpa ada isu berulang di kemudian hari," ujar Nanik.

Ancam Tutup 10 Ribuan Dapur Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Kewajiban tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, yang juga menjabat Ketua Harian Tim Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG.

Menurut Nanik, BGN memberikan tenggat waktu satu bulan kepada seluruh mitra dan yayasan pengelola SPPG untuk segera mengurus pendaftaran SLHS ke Dinas Kesehatan. Bila dalam 30 hari ke depan belum dilakukan, BGN akan menutup sementara dapur MBG yang tidak memenuhi syarat.

"Kalau ada SPPG yang tidak segera mendaftar dalam 30 hari ke depan, dapur nya akan kami tutup sementara," tegas Nanik di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Nanik menjelaskan, aspek higiene dan sanitasi menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, keamanan pangan dan kebersihan dapur merupakan isu sensitif yang langsung menyentuh kepercayaan publik terhadap program unggulan nasional tersebut.

"Kami tidak ingin ada kasus yang mencederai kepercayaan masyarakat. Aspek kebersihan dan kelayakan sanitasi menjadi perhatian langsung Presiden," ujar Nanik.

Ia menegaskan, SLHS menjadi bukti bahwa layanan penyedia makanan telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Sertifikat ini berlaku satu tahun dan wajib diperpanjang agar legalitas operasional dapur tetap terjaga.

Sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, seluruh SPPG diwajibkan memiliki SLHS. Proses penerbitan sertifikat ini mencakup pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, serta uji laboratorium terhadap sarana dan air bersih yang digunakan.

Namun, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rapat Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga akhir pekan lalu, tingkat kepatuhan para pengelola SPPG terhadap kewajiban tersebut masih tergolong rendah.

Lebih dari 14 ribu dapur SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, baru sekitar 4 ribu dapur yang telah mengajukan pendaftaran SLHS. Dari jumlah itu, hanya 1.287 dapur yang sudah menerima sertifikat. Artinya, masih terdapat sekitar 10 ribu dapur MBG yang belum sama sekali mengurus sertifikasi laik higiene sanitasi.

Kewajiban pengurusan SLHS bagi penyedia makanan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.1096/Menkes/Per/VI/2011 serta Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang standar higiene sanitasi jasa boga.

Selain itu, pemerintah daerah dapat menetapkan ketentuan lebih rinci melalui Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur prosedur permohonan, besaran retribusi, dan mekanisme pemeriksaan lapangan.

"Kami meminta kepala daerah membantu mempercepat penerbitan SLHS karena ini bukan sekadar administrasi, tapi soal keamanan pangan yang disajikan untuk jutaan masyarakat," kata Nanik.

"Kami tidak ingin ada kompromi dalam urusan kesehatan publik. SLHS adalah bukti tanggung jawab moral dan profesional dari setiap pengelola dapur," tegas Nanik. (Kum,kcm,gus,ist/dya)



Perda Perlindungan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam DPRD JATIM TEKANKAN KEPASTIAN PASAR



(Ki-ka) Ketua Komisi B DPRD Jatim, Anik Maslachah; Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ibnu Alfandy Yusuf dan Ony Setiawan. (Dok.HumasDPRDJatim)

SURABAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) meminta percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Regulasi ini dinilai mendesak, agar bisa memberikan kepastian pasar dan kesejahteraan masyarakat di sektor tersebut.

Diketahui, hingga kini para pelaku usaha di dua sektor unggulan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Mulai dari ketidakpastian pasar, rendahnya kualitas produksi, hingga lemahnya posisi tawar terhadap industri dan tengkulak.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Anik Maslachah, menegaskan, perda harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu memberikan kepastian pasar bagi para pembudidaya ikan dan petambak garam. Menurutnya, selama ini pelaku usaha di sektor tersebut seringkali dirugikan oleh fluktuasi harga dan keterbatasan akses pasar.

"Utamanya kita mendorong untuk perlindungan dan pemberdayaan. Yang pertama adalah perlindungan. Inti dari perda ini adalah bagaimana petani garam dan pembudidaya ikan memiliki kepastian pasar," ungkap Anik di Surabaya, Selasa (11/10/2025).

Anik menjelaskan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jatim akan mendorong adanya mekanisme penyerapan hasil produksi lokal oleh industri yang menggunakan bahan baku garam. Ia mencontohkan, industri kosmetik, tekstil, makanan, dan minuman selama ini masih bergantung pada impor garam industri.

"Ada banyak industri yang bahan bakunya garam, seperti kosmetik dan tekstil. Selama ini sebagian besar

masih mengandalkan impor. Kita ingin agar ada ketentuan porsi 5-10 persen kebutuhan industri tersebut harus diserap dari garam rakyat," tegasnya.

Langkah itu, lanjut Anik, bukan hanya akan memberikan kepastian pasar bagi petambak garam lokal, tetapi juga memperkuat kemandirian industri nasional. Dengan adanya kewajiban penyerapan garam rakyat, produksi lokal diharapkan tidak lagi menumpuk tanpa pembeli ketika panen raya tiba.

Selain perlindungan pasar, aspek penting lainnya adalah penetapan Harga Pokok Pembelian (HPP) untuk garam rakyat. Menurut Anik, tanpa adanya HPP yang jelas, harga garam akan terus berfluktuasi, dan petambak selalu berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan tengkulak atau perusahaan besar.

"Selama garam belum dianggap sebagai komoditas strategis dengan HPP yang pasti, maka harga akan terus berfluktuasi. Kalau ada HPP minimal 10 persen di atas harga dasar, petani bisa bersaing dan dampaknya akan positif," ujarnya.

Dengan adanya HPP, petambak garam dapat memiliki jaminan pendapatan yang lebih stabil. Kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan praktik permainan harga yang sering terjadi saat produksi melimpah. Dalam jangka panjang, HPP menjadi instrumen ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku industri, dan konsumen.

Meski menjadi salah satu daerah produsen garam terbesar di Indonesia, kualitas garam rakyat Jawa Timur masih dinilai belum memenuhi standar industri. Sebagian besar garam lokal hanya memiliki kadar natrium klorida (NaCl) sekitar 94,5 persen, sedangkan industri

membutuhkan kadar minimal 97 persen dengan kadar air di bawah 0,5 persen.

"Kualitas garam kita masih dominan garam konsumsi, belum garam industri. Karena itu, perlu pemberdayaan yang melibatkan sinergi dengan perusahaan. Kita dorong agar industri melalui program CSR dapat melakukan pembinaan kepada petambak," jelas Anik.

Pemberdayaan ini, lanjutnya, dapat dilakukan melalui pelatihan teknologi pengolahan garam, penyediaan sarana produksi modern, serta pendampingan dalam manajemen usaha. Dengan demikian, garam rakyat tidak hanya terserap di pasar konsumsi rumah tangga, tetapi juga mampu bersaing di pasar industri.

Disebutkan, Jawa Timur memiliki peran penting dalam produksi nasional di sektor perikanan budidaya maupun garam. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya Jatim mencapai 1,39 juta ton, atau sekitar 8,84 persen dari total produksi nasional sebesar 15,75 juta ton.

Sementara jumlah pembudidaya ikan di provinsi ini tercatat mencapai 159.981 orang, dengan dukungan 10.349 unit pengolahan ikan dan 20.615 unit pemasaran, serta menyerap 7.482 tenaga kerja pada tahun 2023.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ibnu Alfandy Yusuf, menyampaikan bahwa fakta tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran regulasi daerah untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.

"Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi besar terhadap produksi perikanan budidaya dan produksi garam di

Indonesia. Tetapi sampai sekarang belum ada perda yang secara khusus melindungi dan memberdayakan pembudidaya ikan serta petambak garam," tuturnya.

Menurutnya, kelemahan utama di sektor garam rakyat terletak pada kualitas produksi. Sebagian besar hasil tambak belum memenuhi standar industri karena kadar NaCl rendah dan kadar air tinggi. Hal ini menyebabkan garam lokal sulit terserap oleh industri pengguna seperti farmasi, makanan, dan tekstil.

"Banyak industri tidak dapat menggunakan garam lokal karena kualitasnya belum sesuai standar. Karena itu, perlu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas garam rakyat yang diusahakan oleh lebih dari 6.600 petambak dan 700 kelompok PUGAR di Jawa Timur," jelasnya.

Selain persoalan teknis dan regulasi, DPRD juga menyoroti aspek keadilan ekonomi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ony Setiawan, menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan perda ini adalah untuk memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh kalangan pelaku usaha di tingkat bawah.

"Tujuannya kami adalah agar petani garam ini dapat lebih sejahtera. Keadilan itu harus dirasakan oleh seluruh kalangan. Ketika mereka berdaya dan memiliki pasar yang menerima hasil produksinya, maka tentu saja kehidupan mereka akan lebih baik," ujar Ony.

Menurut Ony, selama ini petambak dan pembudidaya ikan kerap menjadi pihak paling rentan terhadap perubahan iklim, harga, dan kebijakan. Tanpa regulasi yang melindungi, mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Karena itu, DPRD menilai perda ini harus disusun secara komprehensif dan berpihak kepada masyarakat kecil.

"Kita berharap perda ini tidak berhenti di atas kertas. Harus ada pelaksanaan nyata, baik dari sisi anggaran maupun pengawasan. Kalau semua pihak bersinergi, saya yakin kesejahteraan pembudidaya ikan dan petambak garam di Jawa Timur bisa meningkat signifikan," pungkas Ony. (Pra/adv/Dya)